

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemajuan signifikan di bidang industri, termasuk akuntansi. Dengan sistem informasi, mempermudah pekerjaan manual menjadi lebih efisien (Ardiwinata & Sujana, 2019). Dalam operasional organisasi, sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mencapai tujuan dan mendukung efektivitas organisasi (Ardyani & Yuniarta, 2022). Di era globalisasi, sektor publik dituntut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, setiap daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya sendiri (Numberi, 2022). Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah komponen krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Untuk mencapai efektivitas, SIA memerlukan dukungan berbagai elemen yang dapat meningkatkan kualitasnya (Suryani, 2023). Dengan meningkatnya kompleksitas operasi pemerintah daerah dan tuntutan akuntabilitas, keberadaan SIA yang andal menjadi semakin penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai standar yang berlaku (Penatari & Setiawan, 2020).

Sektor publik perlu menerapkan standar penyusunan laporan keuangan agar kualitas laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan

pihak-pihak terkait (Wahyuni, 2024). Namun implementasi sistem informasi akuntansi (SIA) yang efektif di instansi pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang akuntansi dan teknologi informasi. Keterbatasan pemahaman terhadap konsep akuntansi serta keterampilan teknologi informasi dapat menghambat efektivitas SIA, berdampak pada kinerja karyawan, dan meningkatkan potensi kesalahan dalam laporan keuangan (Chudri et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk menguasai penggunaan sistem berbasis komputer agar mampu mengelola transaksi dengan cepat, menyimpan data dalam jumlah besar, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan laporan tepat waktu (Suryani, 2023). Tantangan teknis lainnya, seperti keterlambatan dalam penginputan data dan kendala infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan masalah pada server, juga berkontribusi pada hambatan dalam proses kerja (Zuhra & Irawan, 2024)

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menerapkan peraturan baru, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menggantikan kebijakan sebelumnya, Permendagri No 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Peraturan ini dikeluarkan pada September 2019 dan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan peraturan baru ini (Vitriana & Ahyaruddin, 2022). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) memiliki peran penting dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di tingkat daerah, berfungsi sebagai perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini akan mengkaji penerapan SIA di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, yang telah mengalami

transformasi signifikan sejak akhir 2010, saat mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem berbasis teknologi informasi (Putri, 2019). Pada akhir 2010, Dinas PUTR memperkenalkan Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah (SIPKD), yang digunakan hingga 2020. Pada tahun 2021, mereka beralih ke Sistem Informasi Pengeluaran Daerah (SIPD). Namun, karena SIPD belum sepenuhnya siap, pemerintah provinsi menyediakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai solusi sementara.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang mencakup semua sistem pemerintahan daerah, termasuk sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lainnya, seperti sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. (Zuhra & Irawan, 2024). Perbedaan antara SIPKD dan SIPD terletak pada pengelolaannya, SIPKD menggunakan jasa pihak ketiga yang dibiayai Kementerian Dalam Negeri, sementara SIPD dikembangkan langsung oleh kementerian pusat. Meskipun SIPKD memiliki fitur yang lebih lengkap, transisi ke SIPD dan penerapan SIMDA juga membawa tantangan. Penggunaan SIMDA, yang baru dimulai pada bulan Mei, mengharuskan input ulang data dari Januari hingga Mei secara manual, menambah beban kerja pegawai, termasuk lembur dan kehati-hatian ekstra dalam penginputan data. Dalam pengoperasian SIPD, pegawai Dinas PUTR harus berkoordinasi dengan BPKPD sebagai penghubung ke pemerintah pusat. Selain itu, pembaruan SIPD yang mendekati fungsionalitas SIPKD juga menciptakan tantangan baru, di mana pegawai perlu mengelola beberapa akun untuk mempermudah proses verifikasi data.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, terdapat beberapa tantangan utama dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD). Bapak Ketut Ari Subawa selaku Sekretaris di Bidang Bendahara Pengeluaran mengungkapkan bahwa:

Penggunaan SIPD kerap terkendala *server down* saat jam kerja, sehingga menghambat efektivitas. Proses pengawasan internal yang berjenjang, dan kesalahan input mengharuskan pengulangan seluruh tahapan, sehingga memperlambat kinerja.

Bapak Swadiyasa Putra selaku Kepala di Bidang Sub. Bagian Umum menambahkan bahwa:

Permasalahan gangguan jaringan yang menghambat input data, sehingga admin harus mengajukan akses ke Kemendagri. Kesalahan pada penetapan rekening atau nominal anggaran diselesaikan melalui pergeseran dana. Latar belakang pendidikan, khususnya ekonomi dan informatika, penting dalam pengoperasian SIPD. Pengawasan dilakukan oleh kepala bidang, dan kepala dinas memberi arahan perencanaan anggaran.

Temuan yang relevan juga terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Putu Ari Sutada selaku Operator di Bidang Bina Marga. Beliau mengonfirmasi bahwa:

Permasalahan server karena akses secara nasional. Kesalahan operasional, seperti penamaan paket, masih bisa diperbaiki saat pergeseran dan sebelum proyek berjalan. Pengawasan dilakukan kepala bidang melalui evaluasi dan *cross check* inputan. SIPD bersifat bom waktu, hanya bisa diakses pada waktu tertentu, memaksa pegawai lembur hingga larut demi mengejar target penginputan.

Wawancara lebih lanjut dilakukan dengan Bapak Gede Surya selaku Operator dari Bidang Cipta Karya. Beliau menjelaskan bahwa terdapat dua jenis SIPD yang digunakan yaitu SIPD RI dari pusat dan SIPD Daerah, meskipun pada tahun 2024 hanya SIPD RI yang akan digunakan. Beliau menyampaikan bahwa:

Permasalahan error sistem saat waktu akses terbatas, misalnya hanya tiga hari, sehingga jika terjadi gangguan, bidang harus mengajukan perpanjangan waktu. Kesalahan input, terutama penempatan koma pada angka besar, memerlukan *cross check* ulang yang memakan waktu. Kompleksitas tugas karena pegawai merangkap pekerjaan lain di luar SIPD. Pengawasan oleh kepala bidang yaitu pemberian arahan dalam format excel dan evaluasi hasil cetak sebelum input final ke sistem.

Secara keseluruhan, tantangan teknis, administratif, dan kompleksitas tugas yang dihadapi pegawai menjadi hambatan signifikan bagi efektivitas penggunaan SIPD di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian Zuhra & Irawan (2024) juga menyatakan hal yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada BKAD Provinsi Sumatera Utara masih kurang efektif karena masalah seperti jaringan yang macet, sering *error server*, dan *load* saat beroperasi.

Fenomena yang terjadi dalam penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di bidang keuangan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketika SIPD mengalami gangguan teknis, seperti *error* atau *server down*, serta kesalahan yang dilakukan oleh pegawai mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan SIPD belum berjalan sepenuhnya. Laporan keuangan ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), khususnya terkait pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang digunakan oleh setiap bidang di instansi tersebut. Akibat dari terhambatnya proses pelaporan ini, pengajuan Ganti Uang (GU) oleh masing-masing bendahara juga mengalami penundaan, yang akhirnya menghambat operasional di berbagai bidang yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang

dilakukan di Kabupaten Aceh Barat oleh Fahzura & Najamudin (2022) menemukan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang digunakan belum optimal.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang diharapkan mampu mendukung kelancaran operasional keuangan. Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan manfaat sistem (*usefulness*) merupakan faktor penting dalam penerimaan dan efektivitas sebuah sistem. Namun, gangguan teknis yang sering terjadi dalam SIPD ini cenderung menurunkan persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat sistem, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat penerimaan dan kepercayaan mereka terhadap sistem tersebut. Selain itu, hambatan teknis ini juga mengakibatkan terganggunya kinerja bendahara yang bertugas memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan tepat waktu. Dalam praktiknya, bendahara membutuhkan akses data dan fitur sistem yang cepat dan *real-time* agar dapat melakukan pertanggungjawaban yang akurat dan efisien. Ketika SIPD tidak dapat diakses, tugas bendahara untuk mengajukan Ganti Uang dan memperbarui laporan keuangan menjadi terhenti, yang berisiko memperlambat jalannya kegiatan operasional di lapangan.

Transformasi sistem informasi akuntansi (SIA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng menghadapi kompleksitas dan tantangan meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi, sistem baru seperti SIPKD, SIMDA, dan SIPD membawa kendala yang harus diatasi. Faktor – faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi meliputi usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kompleksitas tugas, dan

insentif (Salamiyah, 2019). Efektivitas SIA dipengaruhi oleh kemampuan pegawai, yang sangat terkait dengan latar belakang pendidikan mereka dalam akuntansi dan teknologi informasi. Pegawai berpendidikan tinggi lebih mampu mengoperasikan SIA dengan efektif, sedangkan mereka dengan pendidikan rendah dapat mengalami kesulitan (Ningtias & Diatmika, 2021). Proses transisi sistem, kebutuhan input ulang data, dan koordinasi antar bidang menunjukkan tantangan yang signifikan (Widya, 2020). Tugas-tugas kompleks, seperti pelaporan dan penganggaran, memerlukan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan yang tinggi. Jika SIA tidak memenuhi kebutuhan informasi, kinerja karyawan dapat terhambat, mengancam akuntabilitas dan transparansi. Peran pengawas internal sangat penting untuk memastikan integritas SIA. Mereka bertanggung jawab melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal untuk mendeteksi kelemahan (Suryani, 2023). Meskipun penting untuk akurasi dan kepatuhan, peran ini juga dapat mempengaruhi kecepatan proses, terutama jika kesalahan terjadi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya Numberi (2022) dengan menambahkan variabel baru, yaitu peran pengawas internal, tingkat pendidikan, dan kompleksitas tugas. Pemilihan variabel ini didasarkan pada inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian seperti Anjani & Wirawati (2018), Salamiyah (2019), dan Arini & Werdhi (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA, sementara penelitian lain seperti Ningtias & Diatmika (2021), Karuni (2022), dan Pradina (2023) menunjukkan sebaliknya. Hal serupa terjadi pada kompleksitas tugas, di mana penelitian Puspita (2022) dan Pradina (2023) menemukan pengaruh positif, sementara Prabowo (2023) dan Waisnawa & Cahaya (2023) tidak. Terkait

peran pengawas internal, penelitian Suryani (2023) dan Annisya Sarlah Azzahra (2024) menemukan pengaruh signifikan, sedangkan penelitian lain seperti Erika (2023), Waisnawa & Cahaya (2023), dan Dewi et al. (2021) menunjukkan tidak ada pengaruh.

Selain inkonsisten hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian lainnya yang perlu diperhatikan. Dari sisi teoritis, meskipun *Technology Acceptance Model* telah terbukti efektif dalam menjelaskan penerimaan teknologi secara umum, masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya di konteks spesifik sektor publik, khususnya terkait dengan transisi sistem seperti dari SIPKD ke SIPD. Dari sisi metodologi, penelitian – penelitian sebelumnya seperti Zuhra & Irawan (2024) dan Fahzura & Najamudin (2022) lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji efektivitas SIPD, sementara pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel – variabel terhadap efektivitas SIA masih terbatas. Kesenjangan populasi dan geografis juga terlihat dimana penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di dinas pendapatan daerah atau BPKD, sementara penelitian di dinas teknis seperti PUTR masih jarang dilakukan. Perbedaan karakteristik tugas dan kompleksitas pekerjaan di dinas teknis dibandingkan dinas keuangan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami efektivitas SIA.

Motivasi penelitian ini muncul dari urgensi untuk memahami faktor-faktor kritis yang memengaruhi efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik, khususnya di tengah transisi sistem dan tantangan teknis yang dialami Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui optimasi SIA, sekaligus mengisi celah literatur tentang peran kombinasi tingkat pendidikan,

kompleksitas tugas, dan pengawasan internal dalam konteks sistem informasi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi pada literatur akademik dan praktik profesional dalam akuntansi sektor publik, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi di sektor publik.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti berupaya mengungkap lebih dalam mengenai **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompleksitas Tugas dan Peran Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka dapat diketahui beberapa permasalahan yakni:

1. Rendahnya persepsi kemudahan penggunaan SIPD yang ditunjukkan dengan seringnya terjadi gangguan sistem seperti *Server Down* dan *Error Sistem*. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses pembuatan laporan keuangan dan pengajuan Ganti Uang (GU), yang berdampak pada keterlambatan alokasi dana operasional di berbagai bidang.
2. Tingkat pendidikan yang bervariasi di kalangan pegawai menyebabkan perbedaan kemampuan dalam mengatasi gangguan teknis SIPD. Pegawai

dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan informatika cenderung lebih mampu mengatasi masalah sistem dibandingkan dengan pegawai dari latar belakang pendidikan lainnya, sehingga mempengaruhi efektivitas penggunaan SIPD.

3. Kompleksitas tugas dalam pengoperasian SIPD yang tinggi, seperti keharusan input ulang data saat transisi sistem dan pengolahan *multiple account* untuk verifikasi, semakin dipersulit dengan adanya gangguan teknis yang sering terjadi. Situasi ini menyebabkan beban kerja bertambah dan memaksa pegawai bekerja di luar jam kerja untuk memenuhi target.
4. Peran pengawas internal yang melibatkan banyak pihak (Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran) dalam proses verifikasi sistem menjadi semakin kompleks ketika terjadi gangguan teknis. Jika terjadi *error* sistem di tengah proses verifikasi seluruh tahapan harus diulang dari awal yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses kerja.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan dimaksudkan memfokuskan kajian. Sehingga Peneliti hanya memfokuskan pada Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompleksitas Tugas dan Peran Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu dari pengindentifikasian beserta batas masalahannya, maka peneliti merumuskan permasalahan diantaranya:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?
3. Apakah peran pengawas internal berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?
4. Apakah tingkat pendidikan, kompleksitas tugas, serta peran pengawas internal secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu dari latar belakang beserta perumusan masalahannya, maka peneliti menetapkan tujuan antara lain:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.
2. Mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.
3. Mengetahui pengaruh peran pengawas internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, kompleksitas tugas, serta peran pengawas internal secara simultan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Harapan dengan temuan penelitian yang ditemukan mampu menyalurkan faedah yang ditinjau melali teori ataupun praktisnya.

1. Manfaat Teoritis:

Dengan dilaksanakannya penelitian diharapkan mampu menyalurkan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas SIA, seperti tingkat pendidikan, kompleksitas tugas, dan peran pengawas internal dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta memperkaya pengetahuan tentang penerapan teknologi informasi dan pengetahuan akuntansi dalam meningkatkan efektivitas SIA di sektor publik.

2. Manfaat Praktis:

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Luaran dinantikan membantu menentukan kebijakan melalui informasi yang didapat dalam kajian ini, khususnya memuat tingkat pendidikan, kompleksitas tugas, peran pengawas internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.

2. Bagi Mahasiswa

Temuan yang diperoleh diharapkan menambah sumber kajian serta menyumbangkan wawasan kepada pengkaji selanjutnya, khususnya mahasiswa mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi pada sektor publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Luaran dinantikan menjadi sumber tambahan bagi pengkaji selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan sejenis untuk mengembangkan kajian ini sehingga membentuk luaran yang terbaik.

